

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

India merupakan salah satu negara dengan populasi yang besar di dunia dan mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Tentu bukan menjadi hal baru jika di negara ini masih erat kaitannya dengan nilai-nilai dan tradisi ajaran Hindu, termasuk penerapan sistem kasta (*Varna*) dalam kehidupan sosial yang bertujuan untuk membagi masyarakat India ke dalam kelas-kelas sosial berdasarkan empat kategori. *Brahmana* orang-orang tokoh agama, *Ksatria* adalah para prajurit, *Waisya* para pedagang, dan *Sudra* orang-orang pekerja.¹ Dalit tidak termasuk ke dalam *Varna*, mereka sering disebut dengan *untouchable* atau tidak tersentuh karena anggapan yang kotor tidak boleh melakukan kontak dengan kasta di atasnya dan mereka berada paling bawah dalam strata sosial masyarakat India.

Seiring dengan berjalannya waktu penggunaan istilah Dalit semakin modern dengan sebutan *scheduled caste* (SC) dan digunakan dalam administratif Pemerintahan India sebagai pengkategorian untuk kelompok kasta yang terpinggirkan dan mengalami praktik dari *untouchable* ini.² Tradisi yang masih diterapkan oleh masyarakat Hindu India turut menjadi pendorong tingginya budaya

¹S. Nivetha dan U. Marimuthu, "A Study on Origin of Caste System and Its Effects in Present India," *Baltic Journal of Law and Politics* 15, no. 7 (2022), <https://versita.com/manuscript/index.php/Versita/article/view/897>. Hal. 2

²Tanweer Fazal, "Scheduled Castes, Reservations and Religion: Revisiting a Juridical Debate," *Contributions to Indian Sociology* 51, no. 1 (2017): 1–24, <https://doi.org/10.1177/0069966716680429>. Hal. 3

patriarki (*Pativrata*) dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seorang perempuan dalam membina rumah tangga.³ Patriarki yang masih mengakar kuat di India seakan memberi ruang yang sempit bagi para perempuan di sana dengan masalah kesetaraan gender yang terus ada. Para perempuan Dalit di India tidak hanya mendapatkan perlakuan buruk berupa diskriminasi kasta tetapi juga mendapatkan diskriminasi gender di lingkungannya, bahkan dengan laki-laki Dalit itu sendiri. Sistem kasta yang berlaku membuat perempuan Dalit menderita dalam hak pendidikan, perekonomian, dan keterlibatan dalam politik.⁴

Banyak ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan Dalit termasuk dalam hal ekonomi karena jarang mendapatkan pekerjaan yang layak.⁵ Mereka juga termasuk kelompok terbelakang dalam melek huruf dan hanya sedikit dari perempuan Dalit dapat berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, mengingat kembali akan pendapatan rumah tangga yang rendah dan sulit untuk mengakses pendidikan.⁶ Partisipasi politik perempuan Dalit masih berada di bawah jika dibandingkan dengan perempuan kasta atas dan laki-laki Dalit itu sendiri.⁷ Keterbatasan pendidikan membuat mereka kurang menyadari akan hak mereka dan timbulnya rasa kurang percaya diri, sehingga kurang terlibat dalam proses

³Inas Maisan, "*Peran UN Women Dalam Implementasi CEDAW Untuk Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Di India 2016-2021*" (Universitas Islam Indonesia, 2022).

⁴Unnithan SS, "*Dalit Women and Human Rights Violation*," Think India Journal 22, no. 35 (2019): 421–426. Hal.3

⁵ *Ibid.*, Hal.3

⁶Pushendra Singh and Falguni Pattanaik, "Unequal Reward for Equal Work? Understanding Women's Work and Wage Discrimination in India Through the Meniscus of Social Hierarchy," *Contemporary Voice of Dalit* 12, no. 1 (2020): 19–36, <https://doi.org/10.1177/2455328X19898448>. Hal. 7.

⁷Ramandeep Kaur dan Dr. Jagpal Singh, "*Political Awareness among Dalit Women and Their Participation in Rural Local Bodies in Punjab : Special Reference to Bathinda*," Think India Journal 22, no. 14 (2019): 1–9. Hal. 3.

pengambilan keputusan.⁸ Oleh karena itu, Hak-hak perempuan Dalit di India dalam akses perekonomian, akses pendidikan, dan hak politik memiliki keterkaitan, diskriminasi kasta dan gender yang dialami perempuan Dalit telah membatasi hidup mereka.

Walaupun dari Pemerintah India sendiri sudah melakukan ratifikasi dengan turut serta menandatangani *Convention of The Elimination of All Form of Discrimination* (CEDAW) untuk menanggulangi dan mencegah diskriminasi terhadap perempuan pada 18 Desember 1979.⁹ Akan tetapi, India yang saat ini berada di bawah pemerintahan kedua Narendra Modi sejak tahun 2019 dianggap kebijakannya terhadap perempuan India masih belum maksimal termasuk dalam mengurangi kejahatan terhadap perempuan India. Data *National Crimes Record Bureau* (NCRB) tahun 2019-2021 menunjukkan peningkatan penyerangan terhadap perempuan Dalit umur 18 tahun ke atas sebanyak 1,6 dengan total 3.241 kasus.¹⁰ Perempuan Dalit di India masih rentan menjadi korban kekerasan secara seksual dengan kasus yang terus meningkat sebanyak 216 kasus sejak dua tahun terakhir.

Perekonomian perempuan India secara keseluruhan juga masih banyak yang bergerak di bidang pertanian dengan area produktivitas rendah dan upah kerja sedikit serta representasi perempuan dalam parlemen yang masih rendah.¹¹

⁸*Ibid.*, Hal. 7

⁹Inas Maisan, *Op. Cit.* Hal. 16

¹⁰ National Crime Records Bureau, "Crime in India-2021 Vol II," 2021. Hal. 85.

¹¹Deepanshu Mohan and Shreeya Bhayana, "Big Talk, Small Action: Modi Govt's Work on Women's Empowerment in the Last 9 Years," *The Wire*, 2023, <https://thewire.in/women/big-talk-small-action-modi-govts-work-on-womens-empowerment-in-the-last-9-years>, (01/072023,14:50WIB)

Meskipun Modi menyebut jika ia adalah *Bhakt Ambedkar*, menghormati Ambedkar sebagai tokoh reformasi Dalit.¹² Akan tetapi, Dalit masih saja dianggap sebagai kelompok rendah, terlebih Modi yang berasal dari Partai *Bharatiya Janta* (BJP) mengusung *Hindutva* yaitu unsur-unsur ajaran agama Hindu sebagai ideologi politik yang semakin mendorong kebijakan dan strategi *brahmanis* (dominan kasta atas) yang sifatnya menguntungkan kasta atas.¹³ Oleh karena itu, perlakuan yang tidak adil dialami oleh perempuan Dalit di India mendorong munculnya berbagai asosiasi maupun gerakan yang mendukung perempuan Dalit baik dalam tingkat nasional maupun internasional.

International Dalit Solidarity Network (IDSN) merupakan asosiasi sipil global yang memiliki jaringan internasional dengan tujuan bersama untuk orang-orang Dalit. IDSN dibentuk pada Maret tahun 2000 dengan sekretariat di Kopenhagen, Denmark dan bertujuan untuk membela hak asasi manusia Dalit dan memajukan permasalahan yang dialami oleh orang-orang Dalit di negara-negara terdampak kasta termasuk untuk para perempuan Dalit yang menjadi salah-satu tujuan IDSN secara nasional dan internasional.¹⁴ Dalam IDSN terdapat jaringan *Dalit Solidarity Network* di Finlandia, Inggris, Jerman, dan Norwegia, kerja sama dengan organisasi-organisasi nasional di negara yang terdampak kasta seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal, serta melakukan intervensi strategi dan

¹²Santria Agusti, "Analisis Kekerasan Kultural pada Perempuan Dalit India di Era Pemerintahan Narendra Modi" (Universitas Islam Indonesia, 2022). Hal. 41.

¹³ Murali Krishnan, "Pemerintah India Mau Nilai-Nilai Hindu Jadi Ideologi Negara," Deutsche Welle, 2022, <https://www.dw.com/id/pemerintah-india-mau-nilai-nilai-hindu-jadi-ideologi-negara/a-60856452>. (06/04/2023,9:20 WIB)

¹⁴IDSN, "About Us," International Dalit Solidarity Network, 2023, <https://idsn.org/about-us/>. (06/04/2023,9:50 WIB)

aksi lobi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE) sebagai bagian utama dari aktivitas IDSN.¹⁵

IDSN memiliki rencana per lima tahun, salah-satunya *Strategy 2019-2023* yang memfokuskan pada tiga hal yaitu keadilan gender atas perempuan Dalit, hak asasi manusia dan bisnis, serta kesetaraan dalam partisipasi. IDSN melakukan beberapa cara diantaranya meningkatkan kesadaran global agar menumbuhkan solidaritas dan dukungan internasional, memfasilitasi suara orang-orang Dalit agar didengar oleh publik secara internasional, dan mendokumentasikan pola pelanggaran HAM yang dialami Dalit lalu menyampaikan hal tersebut kepada institusi internasional, organisasi, para aktivis, hingga para peneliti di bidangnya.¹⁶ Melalui aksi lobi yang dilakukan dengan PBB, IDSN berperan secara signifikan dalam membawa isu perempuan Dalit menjadi pembahasan dalam tiga sesi berturut-turut forum UN *Human Rights Council* setiap tahunnya hingga sesi yang ke-51 membahas terkait dibutuhkannya tindakan untuk perempuan Dalit atas beberapa perlakuan yang mereka alami seperti kerja paksa, prostitusi paksa, eksploitasi, ujaran kebencian, dan marginalisasi.¹⁷ IDSN juga memasukkan Peninjauan Berkala Universal India dalam forum tersebut termasuk menekankan tentang perempuan Dalit di India yang masih sering menjadi target kekerasan dan terbatasnya kebebasan atas hak-hak mereka.

IDSN juga memberikan masukan penting dalam forum Inisiatif Kerja Paksa Uni Eropa perihal kerja paksa yang dialami kaum Dalit, termasuk mengenai

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ International Dalit Solidarity Network, "Strategy 2019-2023," 2023. Hal.7

¹⁷ International Dalit Solidarity Network, "Annual Report 2022," 2022. Hal. 4

perbudakan berbasis kasta di India karena perempuan Dalit di India tidak terlepas menjadi buruh terikat sehingga para pejabat UE dapat mempertimbangkan kembali untuk memutuskan sebuah kebijakan yang relevan.¹⁸ Kemudian menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan yang dirancang untuk membantu para anggota dan afiliasi pembela Dalit dalam memahami mekanisme forum UE agar dapat terlibat dalam forum tersebut. Adapun kendala bagi IDSN mengenai respon dari pemerintahan India karena sikapnya yang menunjukkan kurang mendukung terhadap isu Dalit.¹⁹ Selain itu, di bawah pemerintahan Modi kebebasan dalam menyuarakan hak minoritas dan terpinggirkan juga seperti dibatasi.²⁰ Oleh karena itu, melihat permasalahan perempuan Dalit di India yang masih terus ada, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait bagaimana peran IDSN sebagai bagian dari masyarakat sipil global dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Dalit di India pada masa pemerintahan Narendra Modi tahun 2019-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya *International Dalit Solidarity Network* (IDSN) dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Dalit di India pada masa pemerintahan Narendra Modi tahun 2019-2023?”

¹⁸ International Dalit Solidarity Network, “Evidence - The Situation Regarding Dalits and Modern Forms of Slavery,” 2022. Hal. 4

¹⁹ Rafika Sekarayu, “Peran International Dalit Solidarity Network Dalam Mengatasi Kasus Diskriminasi Kasta Dalit Di India Tahun 2013-2017,” *UPNV Yogyakarta* (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 2019). Hal. 9.

²⁰ Kalpana Jain, “In Modi’s India, Press Freedom Is Curbed and Journalists Are under Threat for Doing Their Jobs,” Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs, 2023, <https://berkeleycenter.georgetown.edu/responses/in-modi-s-india-press-freedom-is-curbed-and-journalists-are-under-threat-for-doing-their-jobs>. (16/05/2024, 09:30 WIB)

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya International Dalit Solidarity Network (IDSN) dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Dalit di India pada masa pemerintahan Narendra Modi tahun 2019-2023.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Praktis

Penulis berharap pada penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca terutama untuk lembaga-lembaga yang berkaitan dengan isu perempuan seperti Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap isu yang dihadapi perempuan seperti yang dialami oleh perempuan Dalit di India.

1.3.2.2 Manfaat Akademis

Penulis berharap bahwa penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan baru terhadap semua orang dan menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya, dan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan baru dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional terutama wawasan akan upaya dari masyarakat sipil global terhadap kaum minoritas seperti perempuan Dalit di India.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi topik atau isu yang diangkat, agar penelitian ini lebih valid dengan didukung oleh data-data yang ada pada penelitian terdahulu dalam memberikan gambaran dan perbandingan terkait upaya dari IDSN dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Dalit ataupun kelompok marjinal lainnya. Oleh karena itu, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian Pertama adalah sebuah skripsi dari **Santria Agusti** yang berjudul **Analisis Kekerasan Kultural Pada Perempuan Dalit India di Era Pemerintahan Narendra Modi.**²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana terjadinya kekerasan terhadap perempuan Dalit India di pemerintahan Modi menggunakan teori Kekerasan Kultural. Metode penelitian pendekatan kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah perempuan Dalit India dan objeknya adalah kekerasan kultural pada era pemerintahan Modi dan metode pengumpulan data berupa studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai agama menjadi faktor yang dominan mendorong terjadinya kekerasan kultural pada perempuan Dalit India dan masih tingginya patriarki menjadikan fenomena ini tidak akan pernah berhenti pada setiap era pemerintahan. Keterkaitan skripsi dengan penelitian ini adalah relevansi pembahasan perempuan Dalit di India yang menghadapi kekerasan kultural dan hak-hak mereka yang masih terpinggirkan di era pemerintahan Modi.

²¹ Santria Agusti, *Op. Cit.*, Hal. 10

Penelitian Kedua adalah skripsi yang berjudul **Peran *International Dalit Solidarity Network* dalam Mengatasi Kasus Diskriminasi Kasta Dalit di India Tahun 2013-2017** oleh **Rafika Sekarayu**.²² Bertujuan untuk mengetahui peran dari *International Dalit Solidarity Network* (IDSN) dalam mengatasi kasus diskriminasi kasta Dalit di India pada tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan teori Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization*) dengan metode kualitatif. Teknik pengolahan yang data yang digunakan adalah deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IDSN melakukan perannya melalui tiga cara yaitu melalui peran advokasi, peran pengawasan, dan peran fasilitator yang banyak melakukan perannya ke arah internasional dan aktif dalam kegiatan-kegiatan PBB. Keterkaitan dari skripsi ini adalah membahas peran organisasi yang sama dengan pembeda landasan konseptual dan kurun waktu, serta penulis lebih mengkhususkan pada peran IDSN terhadap perempuan Dalit di India

Penelitian ketiga adalah skripsi **Inas Maisan** yang berjudul **Peran UN Women dalam Implementasi CEDAW untuk Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan di India 2016-2021**.²³ Bertujuan untuk menganalisis peran UN Women dalam implementasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations*) untuk mengatasi permasalahan kesetaraan gender di India pada tahun 2016-2021. Menggunakan perspektif *International Organizations and Implementation* pendekatan normatif dan

²² Rafika Sekarayu, *Op. Cit.*, Hal. 9-11

²³Inas Maisan, *Op. Cit.*, Hal. 13

marjinal. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian adalah UN Women dan India, objeknya adalah kesetaraan gender pada perempuan dan kebijakan. Metode pengumpulan data bersumber pada buku dan jurnal yang berkaitan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya UN Women memberikan kontribusi yang cukup dalam membantu mengupayakan permasalahan kesetaraan gender di India. Selain itu, dari pendekatan normatif dengan adanya UN Women di India yang turut meratifikasi CEDAW sebagai upaya kesetaraan gender. Pendekatan manajerial, UN Women memantau melalui laporan pertanggungjawaban dan kerja sama dengan WHO, UNICEF, UNHCR, dan UE bersama dengan pemerintah India. Adanya UN Women di India cukup memberikan peran yang baik dalam membantu permasalahan kesetaraan gender yang sudah mengakar di India. Perbedaan penelitian ini adalah lebih membahas akan permasalahan kesetaraan gender yang dihadapi oleh perempuan India secara keseluruhan, sedangkan penulis lebih mengkhususkan akan permasalahan hak-hak perempuan Dalit di India dan organisasi internasional yang berbeda.

Penelitian keempat jurnal dari **Bhimraj M.** yang berjudul *A Dalit Critique of Environmental Justice in India*.²⁴ Jurnal ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mencoba untuk membuktikan bagaimana orang-orang Dalit di India ini mengalami ketidakadilan dalam lingkungan. Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk memperlihatkan kesenjangan kaum Dalit pada realitanya

²⁴ M Bhimraj, "A Dalit Critique of Environmental Justice in India," *Contemporary Environmental Concerns: Multi-Disciplinary Aspects of Environmental Law*, 2020, 89–120, https://www.researchgate.net/publication/344218629_A_Dalit_Critique_of_Environmental_Justice_in_India. Hal. 2

dan untuk menekan ruang lingkup yang luas dari studi empiris mengenai isu-isu Dalit di India dengan menggunakan pendekatan dari *environmental justice* atau keadilan lingkungan yang memfokuskan pada akses untuk sumber daya alam dan perlindungan yang sama akan kesehatan.

Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa ketidakadilan lingkungan di India pada dasarnya adalah masalah bagi kasta, adanya generalisasi membuat perspektif Dalit dalam masalah keadilan lingkungan dapat dikatakan hilang. Relevansi jurnal dengan penelitian ini adalah membahas permasalahan ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang Dalit di India. Pembeda dalam jurnal ini lebih memfokuskan pada keadilan lingkungan yang menekankan akan akses sumber daya alam dan akses kesehatan, berbeda dengan penelitian ini yang lebih memfokuskan pada perempuan Dalit di India dan hak-hak mereka yang meliputi ekonomi, pendidikan, dan politik.

Penelitian kelima adalah skripsi yang berjudul **Peran *Human Rights Watch* (HRW) dalam Menghapuskan Pekerja *Manual Scavenging* Kaum Dalit India** oleh **Oktavia Arina Haqqo**.²⁵ Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif, dan menggunakan konsep *Global Civil Society* dan *Transnational Advocacy Network*. Tujuannya adalah untuk mengetahui fenomena *manual scavenging* kaum Dalit di India dan implementasi peran HRW dalam menghapuskan pekerja *manual scavenging* kaum Dalit di India. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa HRW berhasil melakukan perannya dalam mengupayakan menghapus *manual scavenging* di India dan memberikan pengaruh

²⁵Oktavia Arina Haqqo, “*Peran Human Rights Watch (HRW) dalam Menghapuskan Pekerja Manual Scavenging Kaum Dalit di India*” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021). Hal. 6.

kepada dunia internasional melalui strategi *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah mengangkat isu Dalit India, tetapi penulis lebih memfokuskan pada permasalahan hak-hak perempuan Dalit India dan peran organisasi internasional yang berbeda.

Penelitian ke enam jurnal dari **Ramandeep Kaur** dan **Jagpal Singh** dengan judul *Political Awareness among Dalit Women and their Participation in Rural Local Bodies in Punjab: Special Reference to Bathinda*.²⁶ Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan responden dalam teknik mengumpulkan data dan konsep partisipasi dan kesadaran politik. Tujuan jurnal ini mengungkapkan kesadaran politik perempuan Dalit dan memfokuskan faktor penghambat partisipasi aktif perempuan dalam politik. Hasil dari jurnal ini menunjukkan partisipasi politik perempuan Dalit tidak terlepas diskriminasi kasta, gender, dan patriarki dan adanya faktor lain yang mempengaruhi dalam kesadaran politik mereka yaitu aspek sosial-ekonomi yang terbelakang dan kurangnya pendidikan mempengaruhi dalam partisipasi politik. Pembedanya adalah jurnal ini lebih memfokuskan pada partisipasi dan kesadaran politik perempuan Dalit India, penulis membahas hak-hak yang meliputi ekonomi, pendidikan, dan politik, serta teknik pengumpulan data yang berbeda.

²⁶ Kaur dan Singh, *Op. Cit.*, Hal. 1

Tabel 1.1
Posisi Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Alat Analisa	Hasil
1.	Santria Agusti, 2022 Skripsi	Analisis Kekerasan Kultural Pada Perempuan Dalit India di Era Pemerintahan Narendra Modi	-pendekatan kualitatif -Teori Kekerasan Kultural	Menunjukkan bahwa nilai agama menjadi faktor yang dominan mendorong terjadinya kekerasan kultural pada perempuan Dalit India dan masih tingginya patriarki menjadikan fenomena ini tidak akan pernah berhenti pada setiap era pemerintahan.
2.	Rafika Sekarayu, 2019, Skripsi	Peran <i>International Dalit Solidarity Network</i> dalam Mengatasi Kasus Diskriminasi Kasta Dalit Tahun 2013-2017	-deskriptif kualitatif -Teori Organisasi Non-Pemerintah (<i>Non-Governmental Organization</i>)	Menunjukkan bahwa IDSN melakukan perannya melalui tiga cara yaitu melalui peran advokasi, peran pengawasan, dan peran fasilitator. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa selama IDSN memperjuangkan hak-hak Dalit terutama di India, organisasi ini banyak melakukan perannya ke arah internasional dan aktif dalam kegiatan-kegiatan PBB.
3.	Inas Maisan, 2022, Skripsi	Peran UN Women dalam Implementasi CEDAW untuk Menangani Permasalahan Kesenjangan	-deskriptif kualitatif - <i>International Organizations and Implementation</i> (pendekatan	Pendekatan normatif dengan adanya UN Women di India, India turut meratifikasi CEDAW sebagai upaya kesetaraan gender. Pendekatan manajerial, UN Women memantau melalui laporan pertanggungjawaban dan

		Gender Terhadap Perempuan di India 2016-2021.	normatif dan marjinal)	kerja sama dengan WHO, UNICEF, UNHCR, dan UE bersama dengan pemerintah India. Peran UN Women di India cukup membantu permasalahan kesetaraan gender di India.
4.	Bhimraj M., 2020, Jurnal	<i>A Dalit Critique of Environmental Justice in India</i>	-deskriptif kualitatif -pendekatan <i>environmental justice</i>	Ketidakadilan lingkungan di India pada dasarnya adalah masalah bagi kasta, adanya generalisasi sehingga perspektif Dalit dalam masalah keadilan lingkungan dapat dikatakan hilang.
5.	Oktavia Arina Haqqo, 2021, Skripsi	Peran <i>Human Rights Watch</i> (HRW) dalam Menghapuskan Pekerja <i>Manual Scavenging</i> Kaum Dalit India	-deskriptif kualitatif - <i>Global Civil Society</i> dan <i>Transnational Advocacy Network</i>	HRW berhasil melakukan perannya dalam mengupayakan implementasi kebijakan untuk menghapus <i>manual scavenging</i> di India dan telah memberikan pengaruh kepada dunia internasional melalui upaya strategi <i>information politics</i> , <i>symbolic politics</i> , <i>leverage politics</i> , dan <i>accountability politics</i> .
6.	Ramandeep Kaur dan Jagpal Singh, 2019, Jurnal	<i>Political Awareness among Dalit Women and their Participation in Rural Local Bodies in Punjab: Special</i>	-eksplanatif kuantitatif -konsep Partisipasi Politik dan Kesadaran Politik	partisipasi politik perempuan Dalit tidak terlepas dari penderitaan mereka akan diskriminasi kasta, gender, dan patriarki. Faktor lain yang mempengaruhi dalam kesadaran politik mereka adalah aspek sosial-ekonomi mereka yang terbelakang. Dari hasil

		<i>Reference to Bathinda</i>	responden 64% setuju bahwa kurangnya pendidikan para perempuan Dalit menjadi alasan utama atas keterbelakangan mereka dan mempengaruhi dalam partisipasi politik.
--	--	------------------------------	---

1.5 Landasan Konseptual

1.5.1 *Global Civil Society* (GCS)

Penelitian ini menggunakan konsep *Global Civil Society* (GCS) dalam menggambarkan upaya IDSN untuk Perempuan Dalit di India. Sebelum benar-benar adanya *global civil society*, masyarakat sipil atau *civil society* terlebih dahulu muncul, menjadi konsep tertua dan lahir dari pemikiran politik Inggris abad ke-16.²⁷ Seorang filsuf Hegel mendefinisikan masyarakat sipil sebagai perantara keluarga dan negara, artinya masyarakat sipil memungkinkan individu tidak hanya menjadi bagian dari keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat tetapi sebagai warga negara juga dapat menjadi bagian dari publik melalui keanggotaan di berbagai institusi yang bertujuan untuk mencapai hal yang sifatnya khusus dan universal.²⁸ Kaldor sendiri mendefinisikan masyarakat sipil sebagai proses individu dalam bernegosiasi, berdebat, berjuang, melawan, atau setuju antar satu sama lain terhadap pusat otoritas politik dan ekonomi melalui asosiasi sukarela, gerakan, partai, serikat, individu, atau pekerja yang dapat melakukan tindakan secara terbuka.

²⁷ Jan Aart Scholte, "Global Civil Society: Changing the World?," *CSGR Working Paper*, no. 31/99 (1999): 1–35, Hal. 2

²⁸ Mary Kaldor, "The Idea of Global Civil Society," *Global Civil Society: Contested Futures* (2004): 583-593, Hal. 584

Civil Society bukan bagian dari negara, tidak memiliki ranah untuk keuntungan, dan dalam mencapai tujuannya dapat berupa konformis yaitu menegakkan dan memperkuat norma-norma yang ada, reformis bertujuan memperbaiki apa yang mereka anggap kurang dalam pemerintahan, dan radikal yang bertujuan mengubah secara menyeluruh tatanan sosial melalui paksaan dan kekerasan.²⁹ Menurut Scholte, masyarakat sipil adalah setiap individu yang mengorganisir suatu hal melalui asosiasi sukarela dalam upaya untuk membentuk tatanan sosial, asosiasi-asosiasi sipil ini juga memiliki badan atau struktur di dalamnya, memiliki strategi, dan tujuan. Masyarakat sipil mencakup keragaman yang sangat besar seperti meliputi lembaga akademis, organisasi berbasis masyarakat, pembela HAM, kelompok tani, serikat pekerja, aktivis perdamaian, ataupun juga dapat berupa sindikat kejahatan dan sebagainya.

Kemudian pendefinisian masyarakat sipil ini mulai berkembang lagi pada abad ke-20, *civil society* tidak lagi hubungan antar individu-individu dan negara, tetapi proses individu dalam persetujuan, negosiasi, atau melawan terhadap lembaga-lembaga global baik badan-badan internasional maupun perusahaan-perusahaan internasional.³⁰ Seiring berkembangnya zaman, pembicaraan mengenai *global civil society* mulai muncul dan berkembang pada tahun 1960-an ketika masyarakat sipil mulai menyadari isu-isu dan kepedulian yang lebih luas dan kecenderungan meningkatnya globalisasi. Pada tahun 1990-an para ahli membicarakan istilah yang sama seperti organisasi non-pemerintah, jaringan

²⁹ Scholte, *Op., Cit.*, Hal. 6

³⁰ Kaldor, *Op., Cit.*, Hal. 590

advokasi internasional, gerakan sosial global, multilateralisme baru, dan sebagainya semua istilah tersebut mencerminkan perhatian yang lebih luas akan globalisasi.³¹ Kata global dalam GCS sendiri memiliki banyak arti seperti internasionalisasi, keterbukaan, universalisasi, atau sinonim dari Westernisasi atau Amerikanisasi, bagi Scholte, kata '*global*' dalam GCS adalah menempati ruang sosial yang melampaui teritorial. John Keane memberikan pengertian bahwa *global civil society* merupakan jaringan luas dari berbagai organisasi non-pemerintah, asosiasi, dan struktur lainnya di tingkat internasional yang di dalamnya melibatkan berbagai aktor individu maupun kelompok yang saling terkait secara fungsional.³² Para aktor sosial GCS juga terikat oleh norma-norma yang telah disepakati dalam mencapai tujuan bersama seperti rasa hormat dan penerimaan terhadap aktor lain dalam mewujudkan kepentingan mereka.³³

GCS merupakan kegiatan sipil yang membahas masalah-masalah lintas batas, melibatkan komunikasi lintas batas, memiliki kelembagaan internasional, dan bekerja atas dasar solidaritas yang bersifat melampaui batas wilayah.³⁴ Hal ini tidak terlepas dari adanya dorongan pemikiran-pemikiran global, perkembangan dalam kapitalis, inovasi teknologi, dan peraturan yang mendukung. Oleh karena itu, *civil society* dapat disebut sebagai *global civil society* ketika pertama, asosiasi sipil turut terlibat dengan isu-isu yang melampaui batas teritorial seperti isu perubahan iklim, hak asasi manusia, atau penyakit lintas dunia seperti AIDS dan sebagainya yang diarahkan pada badan-badan pemerintahan global . Kedua, masyarakat sipil

³¹ Scholte, *Op., Cit.*, Hal. 7

³² John Keane, *Global Civil Society?* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003), Hal. 11

³³ Keane. *Ibid.*, Hal. 12

³⁴ Scholte, *Op., Cit.*, Hal. 10

dapat disebut sebagai masyarakat sipil global dengan melakukan komunikasi lintas batas negara dengan penggunaan teknologi atau media massa secara online. Ketiga, Masyarakat sipil dapat menjadi global sepanjang asosiasi mereka juga dimotivasi atas dasar solidaritas yang sifatnya melampaui teritorial seperti pada kelas, gender, ras, atau dalam rangka menghargai hak asasi manusia dan kampanye dengan organisasi lintas batas.³⁵

Menurut Scholte, perkembangan *global civil society* ini telah menggeser kerangka kerja politik dari prinsip utamanya yaitu kedaulatan negara yang sebelumnya memiliki kekuasaan absolut. Kemudian seiring dengan pertumbuhan komunikasi global dan pasar global negara tidak lagi sepenuhnya memiliki kekuasaan tertinggi dan banyak aktor-aktor global yang turut mempengaruhi proses kebijakan dari sebuah negara.³⁶ Meskipun negara tidak lagi memiliki kedaulatan penuh bukan berarti tanpa atau berkurangnya kedaulatan maka akan berakhirnya sebuah negara, karena negara juga turut mempengaruhi bagaimana berjalannya masyarakat sipil global dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu di negara tersebut sehingga tidak jarang negara menjadi sasaran utama aktivisme sipil di tingkat nasional dan global.

Terdapat beberapa cara yang dikemukakan oleh Scholte agar *civil society* dapat berkontribusi menjadi *global civil society* yang membawa dampak positif dari globalisasi antara lain,

³⁵ Scholte, Hal. 10 *et. Seqq*

³⁶ *Ibid.*, Hal. 23

1. *Secure Welfare Material*

Para masyarakat sipil dapat memajukan arah globalisasi yang lebih berperikemanusiaan dengan menjamin kesejahteraan secara materi melalui bantuan dana, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan materi lainnya terhadap kelompok-kelompok yang rentan karena mekanisme masyarakat sipil lebih efektif dibandingkan sektor publik dan swasta.

2. *Civic Education*

Global civil society juga dapat menjadi sebuah *channel* atau saluran yang penting bagi edukasi untuk masyarakat dalam meningkatkan pemahaman publik akan isu-isu global melalui media massa, situs web di internet, secara audiovisual, atau menyelenggarakan pertemuan sehingga masyarakat luas lebih paham dan sadar terhadap sebuah isu global yang diangkat.

3. *Giving Voice*

Global civil society dapat menyediakan sebuah wadah bagi masyarakat yang terpinggirkan seperti masyarakat adat, petani kecil, masyarakat miskin, dan perempuan yang cenderung terbatas dalam menyampaikan suara mereka, informasi, kesaksian, maupun penilaian terhadap pelaku bisnis maupun badan-badan pemerintahan. Karena itu masyarakat sipil global dapat memberikan ruang terhadap kelompok-kelompok terpinggirkan dalam menyuarakan permasalahan dan hak-hak mereka melalui lembaga-lembaga resmi, dengan begitu kegiatan sipil lintas batas ini dapat menjadi peran penting untuk demokrasi dan kesetaraan.

4. 'Fuel' Debate

Sembari memberikan tempat atas suara kelompok terpinggirkan, masukan-masukan kelompok-kelompok tersebut dapat mendorong terciptanya sebuah perdebatan atau diskusi pembahasan karena pendapat mereka dapat memberikan pandangan, rancangan, ataupun saran lain dalam sebuah agenda sehingga menjadi sebuah 'bahan' pembahasan yang lebih mendalam pada forum-forum diskusi agar menghasilkan kebijakan yang efektif.

5. Increasing Transparency and Accountability

Global civil society juga dapat meningkatkan atau mendorong transparansi dari sebuah institusi global karena banyak cara kerja pasar global dan pengaturan global tidak diawasi oleh publik sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Seperti mendorong transparansi dalam transaksi keuangan global pada aktivitas perusahaan lintas batas, dan badan-badan global agar tidak terjadi penyalahgunaan sehingga para aktor yang terlibat juga memiliki tanggung jawab atas sikap dan kebijakan mereka.

6. Promote Legitimation

Global Civil Society dapat memajukan legitimasi atas isu yang diangkat melalui masukan yang diberikan terutama kepada lembaga internasional terkait kebijakan yang relevan dari lembaga tersebut sehingga dengan masukan ini juga dapat mengetahui sejauh mana tindakan-tindakan yang diambil oleh badan-badan yang terlibat dan juga dapat mendorong aktor-aktor di dalamnya mengakui permasalahan yang diusung dan memiliki kewajiban dalam mematuhi aturan dan tujuan yang sudah disepakati bersama.

7. Enhance Social Cohesion

Global civil society melalui berbagai cara dari poin-poin sebelumnya seperti kontribusi dalam kesejahteraan materi, mengedukasi publik, diskusi publik, dan institusi yang transparan dapat meningkatkan keutuhan sosial yang dapat membantu melawan ketidaksetaraan atau pengucilan terhadap kelompok sehingga dapat mengurangi atau bisa jadi mengatasi isu-isu global.

Penelitian ini menggunakan konsep *Global Civil Society* dalam menggambarkan peran dari IDSN sebagai bagian dari masyarakat sipil global dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Dalit di India. IDSN sebagai bagian dari ruang sosial yang melewati batas teritorial negara yang di dalamnya terdapat jaringan global IDSN yang tersebar di beberapa negara seperti *Dalit Solidarity Network* di Inggris, Jerman, Norwegia, dan Finlandia, bekerja sama dengan organisasi lokal di negara-negara yang terdampak atas kasta, dan melakukan aksi lobi dan terlibat dalam agenda PBB dan Uni Eropa yang relevan. Hal ini bertujuan dalam memajukan permasalahan yang dialami oleh Dalit termasuk para perempuannya atas diskriminasi kasta dan gender khususnya di India di tingkat nasional dan internasional.

Melalui beberapa cara yang dikemukakan oleh Scholte agar menjadi *global civil society* yang positif IDSN sebagai bagian dari asosiasi sipil suprateritorial berupaya melalui *civic education*, *giving voice*, *'fuel' debate*, dan *promote legitimation*. Keempat cara tersebut sesuai dengan upaya IDSN dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Dalit di India diantaranya mengedukasi dengan memberikan informasi dan pemahaman isu Dalit ke publik secara digital

dan non-digital. Memfasilitasi partisipasi perempuan Dalit di agenda-agenda internasional sehingga IDSN menampilkan perspektif lain yaitu dari pendapat perempuan Dalit itu sendiri, dan memajukan permasalahan-permasalahan mereka melalui masukan yang ditujukan kepada lembaga-lembaga yang memiliki wewenang agar mendorong diakuinya permasalahan perempuan Dalit oleh negara-negara anggota agar tercapainya legitimasi nasional dan internasional.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, fakta, atau realita.³⁷ Karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan realitas atau fakta terkait upaya *International Dalit Solidarity Network* dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Dalit di India, sehingga dengan hal tersebut, penulis dapat mengetahui dan memberikan gambaran bagaimana realitas yang terjadi pada perempuan Dalit di India.

1.6.2 Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penulis mengatur secara sistematis hasil tinjauan data yang telah dilakukan kemudian menafsirkannya dan menghasilkan sebuah pendapat atau gagasan yang baru.³⁸ Penulis meninjau dan mengumpulkan data-data kualitatif yang mendukung tujuan penelitian.

³⁷J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>. Hal. 50.

³⁸*Ibid.* Hal. 33.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, artikel, laporan, dan berita online kredibel yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Tinjauan pustaka juga bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.³⁹

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Pada penelitian ini, penulis memberikan batasan materi dan memfokuskan pada bagaimana upaya dari adanya *International Dalit Solidarity Network* dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Dalit di India.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah pada periode kedua pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang masih berjalan sampai saat ini dari tahun 2019 sampai 2023 karena dalam kurun waktu tersebut kebijakannya mengenai pemberdayaan perempuan India masih belum terealisasikan sepenuhnya dan semakin meningkatnya angka kejahatan terhadap perempuan Dalit di India.

1.7 Argumen Pokok

International Dalit Solidarity Network (IDSN) merupakan bagian dari *Global Civil Society* (GCS) yang memfokuskan akan pemajuan hak asasi manusia untuk Dalit agar permasalahan yang dialami Dalit termasuk para perempuan Dalit atas kasta dan gender di negara-negara terdampak salah-satunya India menjadi

³⁹*Ibid.* Hal. 104.

sebuah isu yang diperhatikan pada tingkat internasional. IDSN memiliki jaringan global yang juga tersebar di beberapa negara diantaranya *Dalit Solidarity Network* Inggris, Norwegia, Finlandia, dan Jerman, bekerja sama dengan organisasi lokal di negara-negara yang terdampak kasta selain di India antara lain Nepal, Bangladesh, Pakistan, dan Sri Lanka sebagai anggota maupun asosiasi IDSN, dan terlibat dalam agenda PBB dan UE. Berdasarkan konsep GCS dengan beberapa cara yang meliputi *Civic Education*, IDSN memberikan dan meningkatkan pemahaman publik akan isu perempuan Dalit di India melalui media massa online seperti web IDSN dan media sosial IDSN berupa twitter, youtube, dan facebook, agar publik lebih paham dan sadar.

Melalui cara *giving voice* dan *fuel debate* IDSN melakukan upaya dalam memfasilitasi representasi orang-orang Dalit dari beberapa negara terutama perempuan Dalit India di forum internasional, sehingga IDSN juga mampu menampilkan sebuah isu Dalit melalui perspektif dari orang Dalit itu sendiri dalam sebuah agenda agar isu-isu yang diangkat menjadi lebih mendalam. Berdasarkan cara *promote legitimation* IDSN mampu memajukan legitimasi atas isu perempuan Dalit di India sehingga mendorong pengakuan hingga tindakan terkait permasalahan tersebut dari lembaga yang memiliki pengaruh global seperti PBB dan UE. Pada PBB, isu perempuan Dalit cukup disoroti dalam beberapa laporan UN *Special Rapporteur* (pelapor khusus) atas isu yang relevan seperti perbudakan dan kemiskinan. Kemudian pada UE, isu diskriminasi kasta mulai dimasukkan dalam laporan atau resolusi dari badan-badan UE..

Melalui beberapa cara GCS tersebut, IDSN memiliki posibilitas dalam meningkatkan kohesi sosial atau *enhance social cohesion* karena dapat membawa isu Dalit terutama perempuan Dalit India ke ranah global. Langkah-langkah yang dilakukan IDSN dapat mengurangi isu-isu diskriminasi terhadap Dalit. Walaupun proses dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Dalit di India masih kurang optimal pada tingkatan nasional karena kurangnya perhatian dan penerapan kebijakan dan internasional karena masyarakat internasional masih kurang kesadaran atas isu diskriminasi kasta dan gender yang dialami perempuan Dalit. Selain itu, pada era pemerintahan kedua Modi juga masih belum mewakili orang-orang Dalit, terutama perempuan Dalit di India yang masih terbatasnya hak-hak mereka dan rentan menjadi korban kejahatan serta kekerasan secara seksual.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB	SUB-BAB/POKOK BAHASAN
<p>BAB I PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Praktis 1.3.2.2 Manfaat Akademis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Landasan Konseptual 1.5.1 Konsep <i>Global Civil Society</i> 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Tipe Penelitian 1.6.2 Metode Analisa Data 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4.1 Batasan Materi 1.6.4.2 Batasan Waktu 1.7 Argumen Pokok 1. 8 Sistematika Penulisan</p>

<p style="text-align: center;">BAB II Kondisi Perempuan Dalit di India Pada Masa Pemerintahan Kedua Narendra Modi dan Profil IDSN</p>	<p>2.1 Permasalahan Perempuan Dalit di India Pada Masa Pemerintahan Kedua Narendra Modi</p> <p style="margin-left: 20px;">2.1.1 Kondisi atas Hak Sosial-Ekonomi</p> <p style="margin-left: 20px;">2.1.2 Kondisi atas Hak Pendidikan</p> <p style="margin-left: 20px;">2.1.3 Kondisi atas Hak Politik</p> <p>2.2 Profil <i>International Dalit Solidarity Network</i> (IDSN)</p> <p style="margin-left: 20px;">2.2.1 Latar Belakang dan Visi-Misi IDSN</p> <p style="margin-left: 20px;">2.2.2 Struktur dan Jaringan IDSN</p>
<p style="text-align: center;">BAB III Upaya IDSN dalam Mendukung Sipil dan Fasilitator untuk Perempuan Dalit India</p>	<p>3.1 Upaya IDSN dalam <i>Civic Education</i></p> <p style="margin-left: 20px;">3.1.1 <i>Digital Civic Education</i></p> <p style="margin-left: 40px;">3.1.1.1 Situs Resmi IDSN</p> <p style="margin-left: 40px;">3.1.1.2 Media Sosial IDSN</p> <p style="margin-left: 60px;">A. Twitter IDSN</p> <p style="margin-left: 60px;">B. Facebook IDSN</p> <p style="margin-left: 60px;">C. YouTube IDSN</p> <p style="margin-left: 20px;">3.1.2 <i>Non-Digital Civic Education</i></p> <p>3.2 Upaya IDSN Sebagai Fasilitator melalui <i>Giving Voice</i> dan <i>Fuel Debate</i></p> <p style="margin-left: 20px;">3.2.1 Partisipasi Perempuan Dalit India dalam Forum PBB</p> <p style="margin-left: 20px;">3.2.2 Partisipasi Perempuan Dalit India dalam Forum Uni Eropa</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV Upaya IDSN dalam Memajukan Legitimasi Internasional dan Nasional untuk Perempuan Dalit di India</p>	<p>4.1 Upaya IDSN dalam <i>Promote Legitimation</i> Isu Perempuan Dalit di India pada Tingkat Internasional</p> <p style="margin-left: 20px;">4.1.1 <i>Promote Legitimation</i> pada PBB</p> <p style="margin-left: 40px;">A. Rekomendasi dalam forum Dewan HAM PBB</p> <p style="margin-left: 40px;">B. Pernyataan bersama</p> <p style="margin-left: 20px;">4.1.2 Agenda PBB atas Isu Perempuan Dalit di India</p> <p style="margin-left: 20px;">4.1.3 <i>Promote Legitimation</i> pada Uni Eropa</p> <p style="margin-left: 20px;">4.1.4 Agenda UE atas Isu Perempuan Dalit di India</p> <p>4.2 <i>Promote Legitimation</i> pada Tingkat Nasional</p> <p style="margin-left: 20px;">4.2.1 Kebijakan Pemerintah India untuk Dalit</p> <p>4.3 Tantangan IDSN</p> <p style="margin-left: 20px;">4.3.1 Permasalahan Perempuan Dalit masih menjadi Isu Regional</p>

	<p>4.3.2 Kurang ditekankannya Diskriminasi Kasta dalam Agenda Internasional</p> <p>4.3.3 Tingginya Budaya Patriarki</p> <p>4.3.4 Kurang dalam Penerapan Kebijakan</p>
<p>BAB V PENUTUP</p>	<p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>

